



## Tanda Tanya di Belakang WTP

Oleh

**A Razak Al-Qadri dan Aminullah La Bangge**

WTP SEJATINYA sebuah pendapat (opini) profesionalitas. Pendapat tersebut sebagai rumusan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan entitas. Pendapat profesional itu hanya sah pada identitas tertentu saja. Tidak semua orang yang ahli dalam pekerjaan akuntansi boleh menyatakan pendapat profesional itu.

Begitulah kreasi "aturan main" dalam komunitas ini. Ilmunya sendiri adalah auditing, yang dipandang sebagai "pemeriksaan akuntan". Klaim sedemikian rupa yang membatasi pengertian (reduksi) auditing, mengesahkan mungkin banyak orang tentang bidang pekerjaan dan mengenai subjek yang disebut ahli itu.

Dalam hal ini 'pemeriksaan akuntan' (auditing) adalah pekerjaan yang memeriksa laporan keuangan entitas atau perusahaan. Akuntansi, sebagaimana yang umumnya, pekerjaan yang menghasilkan laporan keuangan, tetapi produk akuntansi itu sendiri tidak dinamakannya laporan akuntansi. Beberapa istilah dalam akuntansi, seperti mencakup dan serupa, yang dianggap seolah-olah sudah tahu sendiri. Salah satu kesulitan dalam akuntansi barangkali banyak dan tidak terbina istilah-istilah keilmuan.

Media tulis banyak mewartakan WTP. Sebagaimana tampaknya, perolehan WTP bagaikan sertifikasi kinerja tata kelola keuangan entitas pemerintahan. Itu yang terlihat dipahami pertama kali. Fenomena (sebagaimana tampaknya) ini menarik perhatian. Apakah WTP itu suatu ilusi atau fatamorgana? Percaya begitu saja pada siapa itu akuntansi dan kuasanya. Kata Michael Foucault (1926-1984), filosof Perancis itu, mengibaratkan pasien yang gampang dan patuh/manut begitu saja tidak kalau kita telusuri kilas balik perihal ini. Kesempatan ini kita menoleh sepiintas pada Teori Quantum dan Teori Relativitas, mengenai materi yang terdalam tampak lebih besar seperti gelombang (sine) daripada partikel. Hukum Ketidakpastian dari pemenang Nobel, Hesenberg, menyatakan bahwa mustahil bagi kita untuk menentukan posisi

dan kecepatan sebuah partikel pada saat yang bersamaan. Semakin teliti kita menentukan posisi sebuah partikel, semakin tidak pasti momentumnya, dan sebaliknya. Dalam mekanika quantum, mustahil kepastian dan ketidakpastian terjadi bersamaan, sampai pada posisi tertentu semakin tidak pasti momentumnya. Hukum mekanistik terkoreksi pada monad atau materi yang terdalam (level subatomik).

Terlebih kepada penampakan secara sosial termasuk pada akuntansi, ketidakpastian itu momentumnya bukan fisik tetapi konseptual. Ketidakpastian itu jika dinyatakan secara matematis di luar momentum rentang 0 sampai 1. Ketidakpastian itu sebagai kemisterian kenyataan dalam pemahaman akal, bukan sesuatu kemustahilan. Jacques Derrida (1930-2004) bilang, yang dapat ditangkal hanya jejak kenyataan, kenyataan itu sendiri tidak hadir (abstain). Padahal, faktanya bahwa sebenarnya kenyataan itu sendiri cahaya sehingga yang tertangkap tampak nisbi. Kita mengakuntansikan kenyataan itu - semungkin tidak mustahil penginderaan bisa (abduktif). Kita mencatat perjalanan sekilas pendapat akuntan pada bidang pemerintahan secara umum.

Dalam masa reformasi tahap pertama, sebagai awal gelombang kedua munculnya Pendapat (opini) akuntan. Karena akuntansi pemerintah adalah hal yang baru, perjalanan penerapan SAP mengalami masa dimana pemerintah tertatih-tatih melaksanakannya di semua instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya Opini Disclaimer (tidak memberikan pendapat) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama lima tahun berturut-turut. Begitupun di lingkungan pemerintah daerah (pemda), waktu itu sebagian besar pemda masih berada diantara opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Disclaimer, sedangkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih menjadi sesuatu yang "mahal", sehingga tidaklah banyak yang mampu mencapainya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, perlahan namun pasti akhirnya akuntansi pemerintah menjadi

hal biasa, kualitas opini laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah membaik secara signifikan. Opini WTP bukan lagi menjadi hal yang "mahal", bahkan ada pemda yang membuat motto "Forever WTP".

Gelombang berikutnya adalah pentas WTP. Dalam periode reformasi akuntansi pemerintahan, seyogyanya akan lebih banyak laporan keuangan pemerintah yang mendapat predikat WTP. Kalau booming WTP, mengikuti pandangan sebelumnya, negara ini dapat disimpulkan secara akuntansi sudah terpenuhi tujuan ekonomi dan sosialnya. Pemerintahan Kota Pontianak misalnya, layak bangga dengan prestasi sudah empat tahun berturut-turut mendapat WTP atas laporan keuangannya yang sudah pula menerapkan basis akuntansi akrual ([nmas.pontianakkota.go.id](http://nmas.pontianakkota.go.id/)). Dibanding Pemerintahan DKI Jakarta yang justru menunjukkan penurunan prestasi dari WTP menjadi WDP untuk periode tahun anggaran 2014. Bisakah dua entitas ini disandingkan untuk dinilai sehingga diperoleh suatu simpulan. Kalau entitas memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang khas, perbandingan semacam itu tidak akurat (*incommensurable*). Sebagaimana dipentaskan, publik mendapatkan suguhan "agenda pemikiran akuntansi" dalam periode reformasi akuntansi pemerintahan.

Sementara di balik pentas ada jurang pengharapan antara idealitas dan realita (*gap expectation*). Laporan keuangan perusahaan secara formal sudah memiliki kepedulian sosial dan lingkungan, tetapi tidak membawa dampak empiris apapun terhadap keberlanjutan dan ekologis di lapangan (Mulawarman, 2011).

WTP merupakan suatu simpulan objektivitas dari internal entitas. Kewajaran sebagai bentuk pemikiran akuntansi yang menilai penampakan entitas sebagaimana materi yang terpetret pada laporan keuangan. Laporan akuntansi menjadi laporan yang tanggap terhadap laporan keuangan. Akuntansi entitas publik di Indonesia sedang membangun diri dan tampil membentuk

lingkungan dan karakter kekitaan, sebuah agenda pemikiran akuntansi. Akuntansi menghadapi tantangan logika sosial sehingga klaim akuntansi sebagai teknologi mengaburkan tujuan akuntansi yang bersifat publik (eksistensi).

WTP kehilangan makna kewajaran yang boleh dipahami publik, yang memberikan penilaian keabsahan (legitimasi) dan keaslian (orsinilitas) terhadap kebendaan laporan keuangan. Ada kesenjangan pemakaian atau pemahaman (beda pengharapan) ataukah politisasi kepentingan (*gap expectation*). Yang mungkin relevan adalah menilai laporan keuangan terkait sebagai ketepatanannya. Akuntansi yang berbasis budaya anglo saxon apakah tepat guna dengan budaya akuntansi Indonesia. Adakah itu? Atau sementara kita melupakan hal itu, karena kita harus melayani 'tamu' investor. Kita bebas krusial itu karena kiblat kita harus mengacu kepada mereka di luar sana.

Sementara eforia akuntansi sudah meredup, terganti eforia hukum yang dijadikan

panglima. Sebagai panglima yang baik, ketuladan hukum adalah perintah kultural dan pesan moral untuk kehidupan yang beradab. Kalau realita dan tujuan hukum ditelelung, membungkus nalar dalam kejahatan sempurna. Takut salah tetapi tidak tahu pula yang benar menciptakan serba salah dan ketakutan-ketakutan. karena kebenaran menjeraka mitos. Jika diudikasi berulang-ulang, memantik penalaran sesat, seperti mengajari anak-anak kecil tentang pemali atau tabu. Peradaban dengan mitos-modern. Ketakutan-ketakutan sebagai dampak pencitraan kebenaran mewabah dalam bentuk psikologi pasar - nalar dicampur dengan sentimen. Timbangan keadilan seperti neraca keuangan. Ruang publik didekorasi berhela identitas. Ketakutan-ketakutan dan kerabunan publik itu adakah ia suatu misteri atau seperti ada kelebat hantu. Bak psipokat kerah putih, tampil kegeliaan serupa dengan kewajaran.

*\*)Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak, Peminat Pemikiran Akuntansi*